

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten Mesuji)**

(Skripsi)

Oleh

RIZKY PRISTIAN



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Mesuji)

Oleh

RIZKY PRISTIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal, dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan, maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, begitu juga sebaliknya jika pengelolaan keuangan dari pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan rendah maka kemungkinan besar akan mampu menurunkan kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan,
Kabupaten Mesuji

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AGAINST QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT (Study In Mesuji Regional)

By

RIZKY PRISTIAN

The objectives to be achieved in this research is to know and analyze the influence of local financial management on the quality of local government financial statements in Mesuji Regional. The type of research used in this study is a causal design, with data collected in this study includes two types namely primary data and secondary data. The data analysis tool used is simple linear regression. Based on the results of research can be concluded that the management of local finance has a positive effect on the quality of local government financial reports Mesuji Regional. The better the financial management performed by employees who have duties and obligations in the field of management of financial statements in each SKPD in Mesuji Regional Secretariat Sekretarisat Regional DPRD, Korpri Secretariat, Secretariat General Election Commission, Satuan PP PP, 18 Dinas and 5 Agency, it will able to improve the quality of financial statements, and vice versa if the financial management of employees who have duties and obligations in the field of management of financial statements in each SKPD in Mesuji Regional Secretariat Sekretariat DPRD, Korpri Secretariat, Secretariat of the General Election Commission, Satuan Pol PP, 18 Dinas and 5 lower Bodies then most likely will be able to reduce the quality of financial statements.

Keywords: Regional Financial Management, Quality of Financial Statement, Mesuji Regional

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten Mesuji)**

Oleh

RIZKY PRISTIAN

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada
Kabupaten Mesuji)**

Nama Mahasiswa : RIZKY PRISTIAN

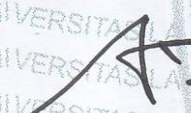
No. Pokok Mahasiswa : 0741031113

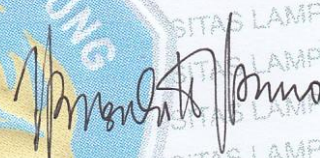
Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

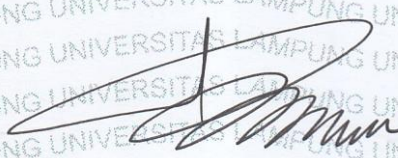
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Kiagus Andi, S.E., M.Si., CA., Akt.
NIP. 19580919 199501 1 001


Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP. 19560410 199003 1 001

2. Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Kiagus Andi, S.E., M.Si., CA., Akt.**

Sekretaris : **Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., Akt.**

Penguji Utama : **Dr. Angrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Pristian

NPM : 0741031113

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2018
Penulis,



Rizky Pristian

NPM. 0741031113

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 Oktober 1988 sebagai putra kedua dari empat bersaudara, pasangan Sohip, ST dan Samsiati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Sukajawa Bandar Lampung pada tahun 2001, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SLTP Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2004, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung lulus pada tahun 2007. dan menempuh pendidikan sebagai mahasiswa D3 Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga lulus tahun 2010. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2011 melalui jalur komversi dan berhasil lulus ujian komprehensif pada tanggal 17 Januari 2018.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

MOTO

“Pelajarilah olehmu ilmu sebab menuntutnya merupakan ibadah, mengulanginya merupakan tasbîh, membahasnya merupakan jîhad, mengerjakannya merupakan sedekah, dan menyerahkannya kepada ahli merupakan pendekatan diri kepada Allah SWT.”

(H.R. Ibnu „Abdîl-Barr)

“Jika kau memulai sesuatu, kau harus menyelesaikannya”

“Lebih baik terlambat daripada tidak diwisuda sama sekali”

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Illahi Robbi karena atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Mesuji)”**.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., CA., Akt., selaku Pembimbing I, terima kasih atas saran dan waktu dalam membimbing hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, saran serta sumbangan pemikiran selama penulisan skripsi ini.
6. Dr. Angrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, tempat penulis memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan selama tercatat sebagai mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Bapak dan Ibu staf administrasi FEB Unila.
9. Ayah Sohip, ST. dan Ibu Samsiati, kakak Mutia, Adikku Indri Kurnia, S.Pd. dan Widya serta keluarga besarku tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, nasihat yang tiada henti, dan juga melimpahkan kasih sayang serta memberikan fasilitas untuk menyelesaikan studi ini. Kalian adalah motivasi dan selalu ada di dalam hati serta pikiran ku.
10. Pimpinan dan teman-teman di Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, terima kasih atas kerjasama dan rasa kebersamaan selama ini.

11. Teman-temanku satu angkatan tercinta Nova, Ance, Mia, Septi, Didik dan yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat dan perhatiannya selama ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman – teman seperjuangan terakhir ini Nita, Didiek, Rini, Mba Tini, Mba Vivin, Mba Sri, Diki dan adik-adik tingkat yang baik hati terima kasih atas semangat, batuan dan perhatiannya selama ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk pacar ku yang tercinta maksih sudah memberikan motifasi dan dorongan morilnya, ku pastikan kita akan menikah.
14. Untuk sahabat yang seperti keluarga sendiri Gerry, Kiki, Riezky, Riski, Rendi, Robby, Friade, Irma, Onang, Irvan dan Iduy yang selalu memberi bantuan dukungan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung, yang telah mendewasakanku dalam bertindak dan berpikir.

Akhirnya, tiada kata yang indak selain do'a, semoga seluruh sumbangsih pemikiran, moral dan material yang telah diberikan menjadi catatan amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pecinta ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2018

Rizky Pristian

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN TEORI	
2.1. Teori yang Dipakai.....	6
2.1.1. Teori Entitas	6
2.1.2. Teori Kegunaan-Keputusan (<i>Decision-Usefulness Theory</i>).....	7
2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.2.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.2.2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	12
2.2.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	15
2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.3.1. Definisi dan Konsep Laporan Keuangan	21
2.3.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.3.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.3.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
2.4. Penelitian Terdahulu	34
2.5. Kerangka Pemikiran.....	34
2.6. Hipotesis.....	37
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Populasi dan Sampel	39
3.1.1. Populasi	39
3.1.2. Sampel.....	39
3.2. Data Penelitian	40
3.2.1. Jenis dan Sumber Data	40

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	41
3.3. Operasional Variabel Penelitian.....	42
3.3.1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	42
3.3.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	42
3.4. Metode Analisis Data.....	43
3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data.....	43
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	45
3.5. Pengujian Hipotesis.....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskriptif Data	49
4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	49
4.2.1. Uji Validitas Instrumen	49
4.2.2. Uji Reliabilitas Instrumen	51
4.3. Uji Asumsi Klasik	51
4.4. Statistik Deskriptif	54
4.4.1. Deskriptif Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Keuangan	54
4.4.2. Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan	56
4.5. Pengujian Hipotesis.....	57
4.5.1. Analisis Regresi Linier Sederhana	57
4.5.2. Uji t	58
4.6. Pembahasan.....	59
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Keterbatasan Penelitian	63
5.3. Saran.....	63
5.4. Implikasi.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	34
2. Definisi Operasional Variabel.....	43
3. Kriteria Autokorelasi.....	47
4. Hasil Uji Validitas Instrumen Pengelolaan Keuangan (X)	50
5. Hasil Uji Validitas Instrumen Kualitas Laporan Keuangan (Y)	50
6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	51
7. Uji Normalitas	52
8. Nilai Tolerance dan VIF.....	53
9. Hasil Statistik Variabel Pengelolaan Keuangan.....	55
10. Hasil Statistik Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	56
11. <i>Coefficients</i>	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	36
2. Uji Heteroskedastisitas.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner Penelitian
2. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pengelolaan Keuangan (X)
3. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan (Y)
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
5. Output Regresi
6. Tabel Uji R
7. Tabel Uji t

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang “Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” untuk memperinci Permendagri 13. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD

membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas kerja/Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dinas Pendapatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Mesuji sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung bahwa laporan keuangan Kabupaten Mesuji pada tahun 2010 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada tahun 2011 dan 2012 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), pada 2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun

2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (www.bpk.go.id, 2015).

Hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Mesuji seperti hasil di atas, menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk dalam kategori belum optimal. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sedangkan opini Tanpa Memberi Pendapat (TMP) yaitu diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak wajar, hal ini disebabkan auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mesuji dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Mesuji)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Mesuji?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Mesuji.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan terutama penerapan teori yang diperoleh selama studi dalam bidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi Akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi secara umum, khususnya pada bidang akuntansi.
3. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori yang Dipakai

2.1.1 Teori Entitas

Teori yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan dalam penelitian ini adalah teori entitas, hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari entitas tersebut.

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) dalam Santoso (2008), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-

undangan melalui penjelasan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Santoso, 2008). Dalam penyajian Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.2 Teori Kegunaan-Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Menurut Staubus (2000) dalam Anthony dan Govindarajan (2005), teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar

cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada

masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Masih menurut PP No. 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi, dalam Permendagri itupun disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan.

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incremental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka dengan menyusun, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan daerah berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim,2002:12).

Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2002:7) mengemukakan sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Menurut Bastian (2001:70-71) mengatakan bahwa sesuatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pelaksanaannya yang tertib dan disiplin, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sumarsono (2010:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mardiasmo (2002:14) mengemukakan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) meliputi:

- a. Tanggung jawab.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
- c. Kejujuran.
- d. Hasil guna.
- e. Pengendalian.

2.2.2 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada aspek Pemerintahan setiap entitas pasti selalu berkaitan bahwa Pemerintah Pusat tedapat Pemerintah Daerah. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sama halnya dengan pengelolaan keuangan negara (Halim, 2002), yang terdiri atas tiga tahapan yaitu :

- a. Perencanaan APBD

Input yang digunakan berupa hasil aspirasi masyarakat yang telah diajukan kepada Dewan dan Eksekutif, yang kemudian aspirasi tersebut ditelaah lebih rinci dalam usulan kegiatan. Unit kerja yang diproses Standar Analisa Belanja. Sehingga setiap kegiatan yang diajukan mencerminkan target kinerja karena telah diproses dengan wajar.

b. Pelaksanaan APBD

Input berupa *output* dari tahap perencanaan berupa APBD. APBD yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan dengan sistem akuntansi yang telah disesuaikan untuk dokumentasi pencatatan laporan pelaksanaan APBD oleh Eksekutif.

c. Pengendalian APBD

Input berupa laporan keuangan APBD yang kemudian diproses dengan mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menghasilkan *output* berupa hasil keputusan evaluasi, penerimaan, dan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Secara umum APBD dapat dilihat dari empat sisi, berupa:

1) Siklus APBD

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibagi menjadi:

- a) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang bermula dari proses Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada prinsipnya adalah melakukan penambahan, pengurangan, dan perpindahan anggaran.
- b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penyusunan:

- (1) Daftar Isian Kegiatan Daerah/Daftar isian proyek daerah;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran;

- (3) Surat Keputusan Otoritas yang merupakan bukti tindakan kepala daerah yang akan mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Belanja Daerah;
- (4) Surat Perintah Membayar Uang;
- (5) Surat Pertanggung Jawaban;
- (6) Laporan Harian.

2) Mekanisme APBD

Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat ditinjau dari:

a) Pendapatan

Rencana pendapatan yang sudah ditetapkan dibagi berdasarkan kemungkinan realisasinya dalam bentuk Anggaran Kas. Realisasi dari pendapatan daerah masuk ke dalam kas daerah.

b) Belanja

Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan.

3) Fungsi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat dari fungsi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menganut sistem:

a) Pengurusan Administrasi

Wewenang dalam rangka mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran.

b) **Pengurusan Kebendaharawan**

Wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada kepala daerah.

4) **Struktur APBD**

Dan strukturnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat dari pendapatan dan belanja. Pendapatan dibagi ke dalam bagian-bagian, bagian dibagi menjadi pos, pos dibagi menjadi ayat. Sedangkan belanja dapat dibagi menjadi belanja rutin dan belanja dapat dibagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a) **Pendapatan Asli Daerah Sendiri**

- (1) Hasil Pajak Daerah;
- (2) Hasil Retribusi Daerah;
- (3) Bagian Laba Perusahaan Daerah;
- (4) Lain-lain usaha daerah yang sah.

b) **Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah**

- (1) Sumbangan dari pemerintah
- (2) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan.

c) **Lain-lain pendapatan yang sah.**

2.2.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Rahmawati (2007), mengatakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang

dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk laporan operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada laporan operasional (LO).

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima

di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan

Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Terdapat beberapa pertimbangan menyeluruh yang dijelaskan di dalam PSAK 101 dalam menyajikan laporan keuangan, salah satunya adalah penyajian secara wajar. Dimana dalam PSAK 101 paragraf 16 bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun

pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Istilah wajar sendiri merupakan istilah yang memang sudah jelas ada di dalam Akuntansi Konvensional. Dimana wajar disini biasanya di dalam sebuah instansi terkait dengan adanya tingkat materialitas yang digunakan dalam membuat laporan keuangan dan juga terkait dengan pemilihan metode-metode yang digunakan dalam menghitung komponen di dalam laporan keuangan. Maksud dari materialitas sendiri yakni besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

Faktor pertimbangan sehat dalam rangka penyajian wajar, diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Definisi dan Konsep Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7) laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2002:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee* (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan mengawasi.

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus

sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3. Investor dan kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmentnya.

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang

dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.

2.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis beesar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional

terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

(a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.3.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya .

Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Kesimpulan
1.	Andiani (2012)	(1) Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan t hitung 3,603 dan $p = 0,001$); (2) Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan t hitung 5,289 dan $p = 0,000$). Hal ini berarti seluruh hipotesis dalam penelitian ini didukung statistik.
2.	Charolina (2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-provinsi Bengkulu.

2.5 Kerangka Pemikiran

Terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan cita-cita semua bangsa, tak terkecuali Indonesia. Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang bisa mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Di

Indonesia sendiri telah banyak dikeluarkan Undang-Undang untuk mengatur segala bidang kemasyarakatan guna terciptanya *good governance*.

Salah satunya undang-undang yang mengatur tentang bidang ekonomi, khususnya pengelolaan keuangan Negara. Munculnya berbagai masalah terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara mulai dari penyelewengan anggaran sampai pada masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menarik perhatian pemerintah untuk menciptakan suatu perundang-undangan untuk memudahkan dalam penyelesaian segala masalah yang ada.

Khusus dalam penyelesaian masalah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka terhitung tahun anggaran 2001, diharapkan terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan Daerah. Salah satunya adalah Laporan Keuangan.

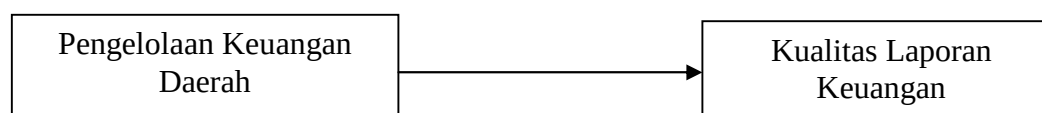
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu standar akuntansi. Penerapan standar akuntansi Pemerintahan suatu Negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang bersangkutan. Untuk negara Indonesia telah dikemukakan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk laporan keuangan pada umumnya terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



2.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistik untuk menganalisisnya. Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai penelitian terkait yang telah dibuktikan kebenarannya.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Upaya pengelolaan keuangan di daerah, maka pemerintah daerah yang telah melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik yang didasarkan pada basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar

akan mampu berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_a = Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan, dengan total pegawai sebanyak 84 orang.

3.1.2 Sampel

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto (2012) apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) bahwa apabila subjeknya lebih dari 100 maka sampelnya dapat diambil 10-15% atau 20-25% dan apabila kurang dari 100 maka dapat digunakan cara sensus. Dengan demikian, maka penelitian ini akan mengambil seluruh populasi yaitu 84 pegawai.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan suatu alat ukur tertentu, yang diperlukan untuk keperluan analisis secara kuantitatif yang berbentuk angka-angka seperti rekapitulasi jawaban responden terkait dengan kuisioner penelitian. Sedangkan data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka (data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar) tetapi berupa penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui metode wawancara dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama (responden) yang telah ditentukan dalam hal ini bersumber dari pegawai yang

mempunyai tugas di bidang penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung (sumber kedua), umumnya diperoleh melalui badan/dinas/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data baik instansi pemerintah maupun swasta. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, dan lembaga lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur; buku-buku, koran, peraturan perundangan dan lain-lain yang menyangkut kajian penelitian yaitu pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang telah ditentukan melalui:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan mencatat informasi-informasi dari seluruh SKPD di Kabupaten Mesuji.
 - b. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan

penelitian ini baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun pihak-pihak yang akan dihubungi yaitu Pegawai Kabupaten Mesuji.

- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari responden mengenai masalah yang diteliti. Angket ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan jawaban yang dapat dipilih oleh responden dari setiap SKPD di Kabupaten Mesuji.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*Dependent Variabel*) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dimensi-dimensi dari kualitas laporan keuangan antara lain :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

3.3.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*Independent Variabel*) adalah pengelolaan keuangan. Penerapan Pengelolaan keuangan yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dimensi dari pengelolaan keuangan tersebut antara lain :

- a. Basis akuntansi
- b. Nilai historis
- c. Substansi mengungguli bentuk formal
- d. Perioditas
- e. Konsistensi

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Nomor Kuisioner
Pengelolaan keuangan (X)	Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Sumarsono, 2010: 121)	1. Basis akuntansi 2. Nilai historis 3. Substansi mengungguli bentuk 4. Perioditas 5. Konsistensi	1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Afiah, 2009).	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	1,2 3,4 5,6 7,8

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji coba instrumen diberlakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar valid, yang dimaksud valid adalah data yang

terkumpul sesuai dengan data yang ada di lapangan, sedangkan yang dimaksud reliabel adalah untuk mengetahui apakah suatu alat ukur yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang berbeda. Untuk uji coba, maka perlu diperhatikan beberapa cara dan pelaksanaan uji coba. Setelah diadakan uji coba instrumen, untuk mengetahui dan memilih butir-butir item yang valid, jika butir-butir tersebut valid, maka butir tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Uji coba instrumen yang dilakukan melalui uji validitas dan realibilitas instrumen.

1. Uji Validitas Angket

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut Ghazali (2009) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Untuk menentukan nilai r_{hitung} , dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka kuesioner valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka kuesioner tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas menurut Ghazali (2009) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung

tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuisisioner $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2009).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot.

Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S $>$ dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2009).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya. Dalam

penelitian ini bila terjadi Autokorelasi, berarti kualitas laporan keuangan selain dipengaruhi oleh variabel independen juga dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Tabel 3. Kriteria Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif, dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Ghozali, 2009

3.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan rumus regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX + et$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Pengelolaan keuangan

et = Error term

Menurut Sugiyono (2010) harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot (\sum X)}{n} \quad b = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Guna menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Hipotesis Alternatif (H_a) sebagai berikut:

H_0 : $r < 0$ Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Mesuji.

H_a : $r \neq 0$ Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Mesuji.

Uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus :

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r)^2}}$$

Keterangan :

t = Pengujian koefisien korelasi

r = Koefisien korelasi parsial

n = Jumlah sampel yang diteliti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Mesuji. Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan yaitu adanya pengaruh positif pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan, maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, begitu juga sebaliknya jika pengelolaan keuangan dari pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji yaitu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Satuan Pol PP, 18 Dinas dan 5 Badan rendah maka kemungkinan besar akan mampu menurunkan kualitas laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Keterbatasan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian secara langsung berdampak pada pengumpulan data di lapangan, walaupun pada akhirnya kuisioner dapat kembali dan diisi secara lengkap dan benar oleh responden penelitian.
2. Keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti tidak dapat terlalu memaksimalkan data yang diperoleh.

5.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan penyebaran kuisioner melebihi dari jumlah sampel penelitian, sehingga dapat meminimalisir jumlah kuisioner yang kembali dan dinyatakan lengkap.
- b. Penelitian selanjutnya, agar mampu menghemat waktu penelitian maka ruang lingkup tempat penelitian harus dipersempit seperti instansi yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan seperti Inspektorat Daerah.

5.4 Implikasi

Berdasarkan hasil penelusuran setiap item variabel penelitian maka dapat dirumuskan implikasinya sebagai berikut :

1. Pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji sebaiknya mencatat semua

transaksi atau peristiwa akuntansi dicatat secara konsisten sesuai dengan aspek formalitasnya, sehingga mampu meminimalisir tingkat kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Pegawai yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang pengelolaan laporan keuangan di setiap SKPD pada Kabupaten Mesuji hendaknya menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sehingga proses revisi apabila terjadi kesalahan akan cepat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. *October 2009 Research Days*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Darsono, Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Andi. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Auditing I (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Edisi Kedua (Revisi). UPP. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Nordiawan, D., Iswahyudi, SP., dan Rahmawati, M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, Trilaksono. 2003. *Administrasi Keuangan Negara*. FIA Universitas Brawijaya. Malang.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

Sukmaningrum. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jilid 1. Edisi keempat. Salemba Empat. Jakarta.

Sumarsono. 2010. *Teori dan Perilaku Organisasi Perusahaan*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.